

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator dari perkembangan suatu negara adalah jumlah penduduk miskin yang terdapat dalam negara tersebut. Karena kemiskinan memberi dampak terhadap aspek kehidupan lainnya, yaitu pendidikan, pengangguran, kesehatan, dan lainnya.

Menurut Wilson dalam Fitriady (2011) mengatakan bahwa masyarakat miskin apabila jumlah populasi penduduk miskinnya lebih dari 20%. Walaupun dalam kenyataannya jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Karo kurang dari 20 % sejak tahun 2006, namun tetap saja terdapat masalah dengan kemiskinan tersebut.

Banyak acuan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan itu, misalnya berdasarkan kebutuhan dasar (UMR), kebutuhan hidup minimum (KHM), US \$ 1,2/kapita/hari (ILO), 2100 kalori/kapita/hari (BPS), dan kriteria kemiskinan pemerintah daerah.

Menurut *World Bank* ada tiga penyebab kemiskinan, pertama: rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Kedua: ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat. Ketiga: rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 17 Kecamatan. Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 212.725 Ha atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara dimana jumlah penduduknya mencapai 38.676 atau 11 % dari jumlah penduduk kabupaten karo (BPS 2011).

Pada Tabel 1.1 akan ditunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten karo.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo
Tahun 2000-2012

Tahun	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Penduduk Miskin (%)
2000	82.650	27.67
2001	81.367	26.42
2002	73.770	26.65
2003	74.300	25.63
2004	68.706	24.66
2005	67.415	23.89
2006	71.800	22.00
2007	50.843	21.32
2008	46.409	20.96
2009	42.619	18.25
2010	38.676	17.43
2011	37.228	16.23
2012	36.087	15.76

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Karo

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin menurun setiap tahun, dan penurunan jumlah penduduk miskin yang paling drastis terjadi pada tahun 2009 yaitu menurun dari 20,96% pada tahun 2008 menjadi 18,25%. Penurunan ini disebabkan karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-2011 telah ditetapkan fokus perhatian terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Karo.

Penurunan yang paling kecil terjadi pada tahun 2002 yaitu dari 26,42 pada tahun 2001 menjadi 26,65 pada tahun 2002.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan antara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari Tahun 1999-2002.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan Sumatera Utara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo lebih besar seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.2. Pada tabel di bawah dapat dilihat persentase penduduk miskin Kabupaten Karo rata-rata lebih tinggi yaitu 23,9 persen dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi yaitu sebesar 14,95 persen. Perbedaan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi pada tahun 2002 dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo lebih banyak 10,8 persen dibandingkan dengan penduduk miskin di Sumatera Utara.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2012

Tahun	Kabupaten Karo		Provinsi Sumatera Utara	
	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase (%)

2000	82.650	27,67	3.871	18,41
2001	81.367	26,42	3.791	18,20
2002	73.770	26,65	1.889,4	15,89
2003	74.300	25,63	1.800,1	14,93
2004	68.706	24,66	1.840,2	14,68
2005	67.415	23,89	1.979,7	15,66
2006	71.800	22,00	1.768,4	13,90
2007	50.843	21,32	1.613,8	12,55
2008	46.409	20,96	1.499,7	11,51
2009	42.619	18,25	1.490,9	11,31
2010	38.676	17,43	1.481,3	11,33
2011	37.22	16,23	1.407,2	10,67
2012	36.08	15,76	1.378,4	10,41

Sumber : Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Apa yang tampak pada tabel di atas sesuai dengan apa yang dikatakan Todaro (2000). Menurut Todaro, masalah kemiskinan di negara-negara berkembang bahwa perhatian utama sebagian besar pemerintahan negara-negara berkembang justru tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan sebagai sektor ekonominya, yakni sektor-sektor industri modern dan komersial. Sementara itu investasi pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan masyarakat di pedesaan justru kurang memadai, karena sebagian besar dananya telah tercurah ke sektor-sektor moderen di daerah perkotaan.

Dalam pidato Theodore Schultz (1979) pada saat penerimaan nobel tahun 1979 mengatakan:

“Most of the people in the world are poor, so if we knew the economics of being poor we would know much of the economics that really matters. Most of the world's poor people earn their living from agriculture, so if we knew the economics of agriculture we would know much of the economics of being poor”

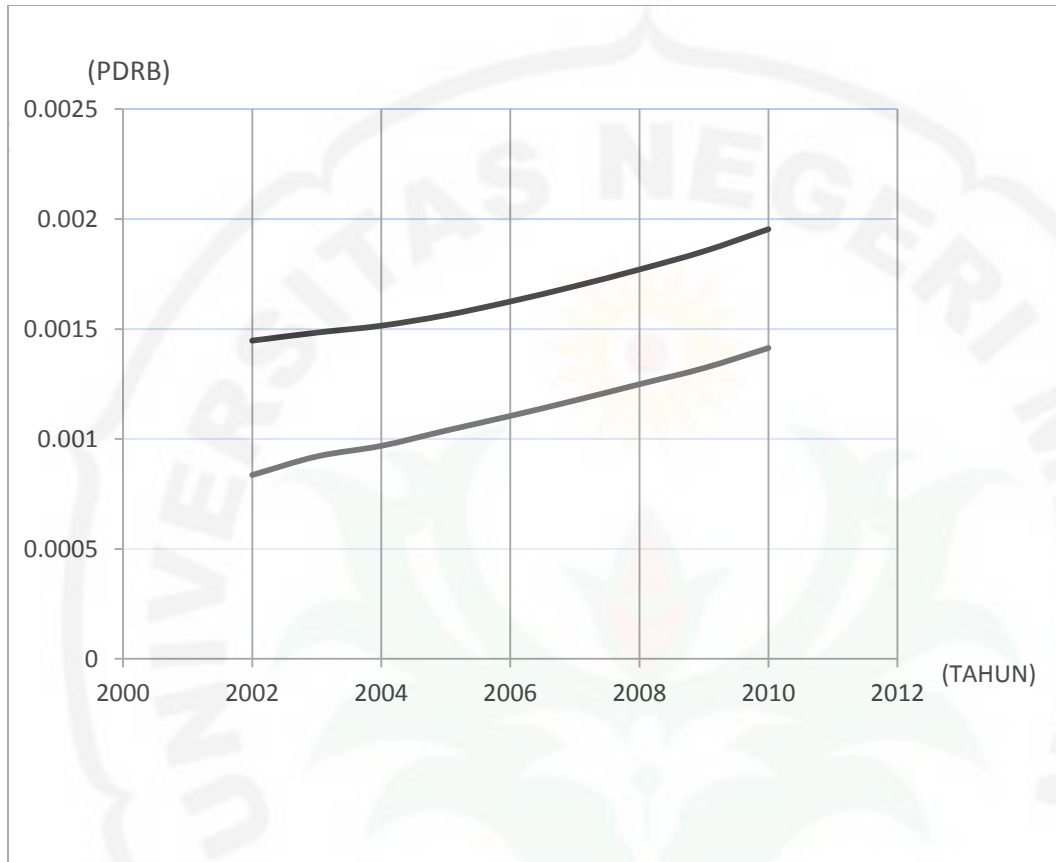
Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ada keterkaitan pertanian dan kemiskinan yang dialami dalam suatu daerah. Begitu juga di kabupaten karo, dimana sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani (Kajian Ekonomi Karo 2007-2011).

Hal yang serupa juga dapat dilihat dari apa yang dikatakan oleh Profesor Raanan Weitz dalam Todaro (2000) berikut ini:

"Bagi sejumlah besar keluarga pertanian yang anggotanya merupakan tenaga kerja pokok, pertanian bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan atau sumber pendapatan semata-mata, melainkan suatu pandangan dan gaya hidup. Kenyataan ini sebenarnya mudah dilihat, terutama sekali pada masyarakat-masyarakat tradisional, di mana para petani sepanjang hari mengabdikan diri menggarap lahannya dengan dedikasi penuh”.

Di Kabupaten Karo pertumbuhan ekonomi lebih banyak disumbangkan dari sektor pertanian, seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 berikut:





: Sektor Pertanian
 : Sektor Non-Pertanian

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Karo

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo
Tahun 2000-2012(Persen)

Pada Gambar 1 di atas dapat dilihat pertumbuhan yang dialami oleh Kabupaten Karo terus mengalami kenaikan, tetapi jumlah masyarakat miskin tidak berkurang mengikuti pertumbuhan tersebut. Pada Tabel 1.3 akan ditunjukkan PDRB dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Karo:

Tabel 1.3 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2010-2011 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan

	2010	2011	2010	2011
1. Pertanian	4.078,03	4.652,44	1.953,70	2.067,28
2. Pertambangan dan Penggalian	23,90	28,08	12,45	13,96
3. Industri Pengolahan	48,91	54,68	24,71	25,85
4. Listrik, Gas, dan Air	21,72	23,14	9,98	10,47
5. Bangunan/Konstruksi	238,92	268,64	118,97	126,08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	772,62	789,54	490,18	529,54
7. Pengangkutan dan Komunikasi	503,92	537,54	301,98	314,80
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	108,26	116,13	55,17	58,84
9. Jasa-Jasa	879,74	1.074	400,05	442,31
Jumlah	6.676,02	7.634,39	3.367,19	3.589,13

Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Karo

Pada publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karo ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian adalah sektor yang penting dalam perekonomian Kabupaten Karo.

Bertolak dari kenyataan-kenyataan tersebut, menarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo. Dalam hal ini peneliti memilih variabel PDRB sektor pertanian yang memang merupakan sektor yang paling banyak menunjang

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Selain dari PDRB sektor pertanian, pendidikan, tingkat pengangguran, dan inflasi.

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka penulis tertarik untuk mempelajarinya dan menarik judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah: Apakah ada pengaruh PDRB sektor pertanian, pendidikan, tingkat pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB sektor pertanian, pendidikan, tingkat pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari hasil penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk memberi sumber kajian bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai kemiskinan.
2. Untuk memberi masukan bagi pihak-pihak pengambil keputusan yang berkaitan dengan kemiskinan.